

TESIS

**PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DAERAH MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTANSI PADA KANTOR BIRO UMUM SEKRETARIAT
PROVINSI SULAWESI BARAT**

*THE EFFECT OF FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM ON REGIONAL
FINANCIAL PERFORMANCE THROUGH THE IMPLEMENTATION OF
THE ACCOUNTING SYSTEM IN THE OFFICE OF THE GENERAL
BUREAU OF THE SECRETARIAT OF WEST SULAWESI PROVINCE*

**MUH. HIDAYAT B.
A042192015**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DAERAH MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTANSI PADA KANTOR BIRO UMUM SEKRETARIAT
PROVINSI SULAWESI BARAT**

***THE EFFECT OF FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM ON REGIONAL
FINANCIAL PERFORMANCE THROUGH THE IMPLEMENTATION OF
THE ACCOUNTING SYSTEM IN THE OFFICE OF THE GENERAL
BUREAU OF THE SECRETARIAT OF WEST SULAWESI PROVINCE***

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
Disusun dan diajukan oleh

**MUH. HIDAYAT B.
A042192015**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA
KEUANGAN DAERAH MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI
PADA KANTOR BIRO UMUM SEKRETARIAT
PROVINSI SULAWESI BARAT**

*THE EFFECT OF FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM ON REGIONAL
FINANCIAL PERFORMANCE THROUGH THE IMPLEMENTATION OF THE
ACCOUNTING SYSTEM IN THE OFFICE OF THE GENERAL BUREAU OF THE
SECRETARIAT OF WEST SULAWESI PROVINCE*

disusun dan diajukan oleh

**MUH. HIDAYAT B.
A042192015**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 24 Februari 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 196509251990022000

Pembimbing Pendamping,

Dr. Djumidah Maming, SE., M.Si.
NIP. 196604011991032001

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,

Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP. 197106192000031001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 197106192000031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muh. Hidayat B

NIM : A042192015

Jurusan/program Studi : Magister Keuangan Daerah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul :

**PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN KINERJA
KEUANGAN DAERAH MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTANSI PADA KANTOR BIRO UMUM SEKRETARIAT
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2 Maret 2021

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000 RUPIAH' and 'METERAI TEMPEL'. A unique identification number '6636BAJX613644569' is printed at the bottom of the stamp.

MUH. HIDAYAT B.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis/disertasi ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada :

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A**, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. **Ibu Prof. Dr. Mediaty, SE., M.Si., Ak.,CA** dan ibu **Dr. Djumidah Maming, SE., M.Si** sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.
5. Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada tim penguji, bapak **Prof. Dr. Maat pono, SE.,M.Si**, bapak **Dr. Syahrudin, SE.,M.Si**,

dan bapak **Dr. Hamrullah SE.,M.Si** yang telah memberi saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Seluruh staf Jurusan Magister Keuangan Daerah serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang banyak memberi bantuan kepada penulis.

Terima kasih kepada ayahanda Alm. Bahtiar Yandang, ibunda ST. Nur Madiah, istri tercinta Erpianah B, ananda Muh. Jibrán Hidayat dan Jihan Salasabila Hidayat, saudara-saudara, teman-teman peneliti, serta pihak akademik atas bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis/disertasi ini terselesaikan dengan baik.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, 2022

Peneliti

ABSTRAK

HIDAYAT. *Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Melalui Implementasi Sistem Akuntansi di Kantor Sekretariat Provinsi Sulawesi Barat (dibimbing oleh Mediaty dan Jumidah Maming).*

Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa jauh pengaruh sistem pengelolaan keuangan terhadap pengawasan keuangan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan implementasi sistem akuntansi sebagai variable mediasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sistem pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap implementasi sistem akuntansi di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat; (2) sistem pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat; (3) implementasi sistem akuntansi berpengaruh signifikan terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat; dan 4) sistem pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah melalui implementasi sistem akuntansi di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Kata Kunci: sistem pengelolaan keuangan, kinerja keuangan daerah, sistem akuntansi



ABSTRACT

HIDAYAT. *The Effect of Financial Management System on Regional Financial Performance Through the Implementation of Accounting System at the Secretariat Office of West Sulawesi Province* (supervised by Mediaty and Jumidah Maming)

The aim of this research is to analyze the what extent the effect of financial management system on the function of regional financial supervision either directly or indirectly using the implementation of accounting system as a mediating variable.

This research used quantitative approach.

The results show that (1) financial management system has a significant effect on the implementation of accounting system at the regional secretariat of West Sulawesi Province; (2) financial management system has a significant effect on the function of regional financial supervision at the regional secretariat of West Sulawesi province; (3) the implementation of accounting system has a significant effect on the function of regional financial supervision at the regional secretariat of West Sulawesi province, and 4) financial management system has a significant effect on the the function of regional financial supervision through the implementation of accounting system at the regional secretariat of West Sulawesi province.

Keywords: financial management system, regional financial performance, accounting system



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pengertian Keuangan Negara.....	9
2.1.2 Sistem Pengelolaan Keuangan.....	12
2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah.....	15
2.1.4 Implementasi Sistem Akutansi	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Kerangka Konseptual.....	27
2.4 Hipotesis	28

BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Rancangan Penelitian.....	29
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	29
3.3 Populasi dan Sampel.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Skala Pengukuran	30
3.6 Uji Validitas dan Reabilitas	31
3.7 Teknik Analisis Data	32
3.8 Definisi Oprasional Variabel	34
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36
4.1 Uji Validitas dan Reabilitas	36
4.1.1 Uji Validitas	36
4.1.2 Uji Reliabilitas	37
4.2 Deskripsi Responden.	38
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	38
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	39
4.3 Deskripsi Variabel	40
4.3.1 Deskripsi Variabel Sistem pengelolaan keuangan (X)	40
4.3.2 Deskripsi Variabel Implementasi sistem akuntansi (Z)	41
4.3.3 Deskripsi Variabel Kinerja keuangan daerah (Y).....	42
4.4 Hasil Analisis Data	44
4.4.1 Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	44
4.4.2 Pengujian Hipotesis	45
4.4.2.1 Pengaruh Langsung	45
4.5 Analisis Pengaruh Jalur	49
4.5.1 Uji Hipotesis (Pengaruh tidak langsung)	49
BAB V PEMBAHASAN	51
5.1 Pengaruh Sistem pengelolaan keuangan Terhadap Implementasi sistem akuntansi.....	51

5.2	Pengaruh Sistem pengelolaan keuangan Terhadap Kinerja keuangan daerah	52
5.3	Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Terhadap Kinerja keuangan daerah	55
5.4	Pengaruh Sistem pengelolaan keuangan Terhadap Kinerja keuangan daerah melalui implementasi sistem akuntansi.	56
BAB VI PENUTUP		59
6.1	Kesimpulan.....	59
6.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		61
DAFTAR LAMPIRAN		63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel. 3.1 Definisi Operasional	35
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas.....	36
Tabel 4.2 Hasil Uji Reabilitas	38
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	38
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	39
Tabel 4.5 Tanggapan Responden Tentang Sistem pengelolaan keuangan	40
Tabel 4.6 Tanggapan Responden Tentang Implementasi Sistem Akuntansi.....	42
Tabel 4.7 Tanggapan Responden Tentang Kinerja keuangan daerah	43
Tabel 4.8 Coeffients	45
Tabel 4.9 Model summary	46
Tabel 4.10 Rangkuman Hasil Koefisien Jalur	46
Tabel 4.11 Coeffients jalur 2.....	47
Tabel 4.12 Model Summary.....	48
Tabel 4.13 Rangkuman Hasil Koefisien Jalur 2.....	49
Tabel 4.14 Hasil Sobel Test Calculator.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	27
Gambar 4.3 Hubungan tidak langsung X terhadap Y melalui Z.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pengendalian dan pengawasan sangat penting untuk pencapaian keberhasilan dan kemajuan organisasi. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan Negara, menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah dan evaluasi yang dilakukan secara independent, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Setiawan & Putro, 2013).

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari pola sentralisasi menjadi pola yang terdesentralisasi (otonomi daerah), membawa konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disatu sisi, dan disisi lain pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberi kewenangan dan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan

kerugian keuangan negara, dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kinerja keuangan daerah (Matei et al., 2017).

Salah satu perubahan mendasar dalam manajemen keuangan daerah pasca reformasi keuangan daerah adalah perubahan sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Inti dari perubahan tersebut adalah tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten dan kota. Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, pemahaman atas akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu dimensi penting yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal selanjutnya yang dapat mempengaruhi optimalisasi system pengawasan keuangan daerah yakni implementasi sistem akuntansi pemerintahan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan kemudahan dan kemanfaatan sistem akuntansi pemerintahan sebagai pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Andiani, 2012).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, pemahaman atas akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu dimensi penting yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Alokasi anggaran publik dilakukan pengawasan dengan baik yang tercermin dalam anggaran pendapatan daerah (APBD) dapat diperuntukkan untuk kepentingan publik. Suwardjono

Andiani (2012). dalam menegaskan bahwa akuntansi akan mempunyai peran yang nyata dalam kehidupan sosial ekonomi kalau informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambil kebijakan ekonomi untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomi negara. Salah satu tujuannya adalah alokasi sumber daya ekonomi secara efisiensi sehingga sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal. Hal ini juga dikemukakan oleh Hay (1997) dalam Azlan, M., Herwanti, T., & Pituringsih, E (2019) bahwa secara umum tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan bagi pemerintah adalah : (1) menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, politik, dan sosial serta penampilan akuntabilitas dan stewardship; (2) menyajikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja manajer dan organisasi dalam pemerintahan (Andiani (2012)).

Bila dicermati lebih jauh dalam pengelolaan keuangan daerah, akuntansi menjadi salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Newkirk (1986) dalam Halim, A., & Damayanti, T. (2007). yang menegaskan bahwa dari sekian banyak problem yang ada pada pemerintah daerah, salah satunya adalah tentang akuntansi. Pernyataan ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing unit satuan kerja perlu dicermati guna menyelesaikan problem akuntansi dan penyajian informasi yang memadai. Hal ini dikemukakan oleh mardiasmo (2002) bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini

berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel.

Lebih lanjut, mardiasmo (2002) menyatakan bahwa terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka tidak peduli atau mungkin tidak mengerti permasalahan sesungguhnya. Peterson (1994) dalam mardiasmo (2002) menegaskan bahwa improving budgeting di negara berkembang sulit dilakukan karena terdapat sejumlah keterbatasan dan kuatnya proses politik dalam alokasi sumber daya. Seperti halnya dikemukakan oleh Newkirk (1986) dalam Baldric Siregar (2015) bahwa keberhasilan pengembangan sistem informasi akuntansi keuangan sangat tergantung pada komitmen dan keterlibatan pegawai pemerintah daerah. Pernyataan ini menandakan sistem akuntansi keuangan sebagai alat kontrol perlu dipahami oleh personel atau pegawai unit satuan kerja pemerintah daerah yang berkomitmen, artinya keterlibatan pegawai yang memiliki pemahaman di bidang sistem akuntansi harus didukung oleh komitmen. Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara memadai oleh penyedia informasi keuangan. Sebagai alat kontrol dan alat untuk mencapai tujuan pemerintah, dari kacamata akuntansi, khususnya sistem akuntansi keuangan, akuntansi harus dapat berperan dalam mengendalikan roda pemerintahan dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aturan yang berlaku (Suwardjono, 2005 dalam Baldric Siregar, 2015).

Perubahan kondisi menuntut manajemen pemerintah daerah untuk membangun instrumen informasi keuangan yang memadai dan andal agar dapat

digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan yang rasional dalam mekanisme perencanaan dan pengendalian. Informasi keuangan tersebut tidak saja diperlukan untuk keperluan manajemen (*intern*), melainkan juga untuk memenuhi keperluan pihak luar (*ekstern*) dalam rangka pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja keuangan daerah. Untuk mewujudkannya diperlukan peningkatan peran fungsi aparat pemeriksa fungsional pemerintah di lingkungan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002). Fungsinya adalah melaksanakan fungsi pengawasan intern (*internal control*) yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selama ini ada anggapan bahwa lembaga pemeriksa fungsional eksternal tidak mampu mengemban fungsinya dengan efektif, demikian juga lembaga pemeriksa fungsional intern yang berlapis-lapis pada umumnya tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik (Damanik, 2001). Pemerintah daerah merasa bahwa audit yang dilaku terlalu banyak sehingga terjadi tumpang tindih audit finansial yang dilakukan oleh aparat pemeriksa fungsional intern maupun ekstern. Tumpang tindih tersebut telah berjalan bertahun-tahun dan terus-menerus sehingga audit lebih merasakannya sebagai beban daripada bantuan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan. Di samping itu, aparat pemeriksa fungsional pemerintah di daerah dalam menjalankan tugasnya sering mengalami hambatan-hambatan misalnya budaya kurang transparansinya laporan keuangan daerah, terbatasnya team monitoring dalam perencanaan penyusunan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan fenomena penelitian maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Kinerja Keuangan Daerah Melalui Implementasi Sistem Akuntansi Pada Kantor Biro Umum Sekretariat Provinsi Sulawesi Barat”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh sistem pengelolaan keuangan terhadap implementasi sistem akuntansi ?
2. Apakah terdapat pengaruh sistem pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan daerah ?
3. Apakah terdapat pengaruh implementasi sistem akuntansi terhadap kinerja keuangan daerah ?
4. Apakah terdapat pengaruh sistem pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan daerah jika di mediasi oleh implementasi sistem akuntansi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu Untuk menganalisis sejauh mana pengaruh system pengelolaan keuangan fungsi terhadap pengawasan keuangan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan implementasi system akuntansi sebagai variable mediasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sistem keuangan daerah. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya yang ingin meneliti lebih jauh dan mendalam terhadap hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi-instansi pemerintah daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penulisan tesis agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah peneliti hanya membahas tentang system pengelolaan keuangan, implementasi system akuntansi dan kinerja keuangan daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan tesis ini maka peneliti menguraikan kedalam enam bab yang didalamnya terdiri dari beberapa sub bab dapat diuraikan satu persatu dibawah ini :

Bab I : PENDAHULUAN

Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan teori yang terdiri dari teori serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga yakni metode penelitian membahas mengenai rancangan penelitian, situs dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data dan definisi operasional.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat berisikan gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V : PENUTUP

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Goal setting theory merupakan grand teori dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa individu berkomitmen terhadap sasaran, artinya bertekad untuk tidak menurunkan/meninggalkan sasaran atau menghasilkan tingkat kerja yang lebih tinggi. Hal tersebut juga dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan daerah (Putri, 2010). Landasan teori dalam penelitian ini terdiri dari beberapa konsep yang berhubungan dan dimulai dari sistem pengelolaan keuangan sebagai variabel bebas (Independen), kinerja keuangan daerah menjadi variabel terikat (Dependen) dan implementasi sistem akuntansi sebagai variabel intervening (mediasi).

2.1.1 Pengertian Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan suatu istilah yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan para ahli di Indonesai. Menurut Undang-Undang no 17 tahun 2003 Tentang keuangan negara dalam Andiani (2012), keuangan negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja dalam Gunawan Widjaja (2002) menyatakan bahwa keuangan negara adalah bersifat plastis, tergantung kepada sudut pandang, sehingga apabila berbicara keuangan negara di sudut pemerintah pusat maka yang dimaksud dengan keuangan negara adalah APBN, sedangkan dari

sudut pandang pemerintah daerah adalah APBD, demikian juga seterusnya dengan perjan, PN-PN, maupun Perum atau dengan perkataan lain definisi keuangan negara dalam arti luas hanya meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada perjan, perum, PN-PN dan sebagainya. Dan dalam arti sempit hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Demikian pula bila keuangan negara ditinjau dari ruang lingkup pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1973, maka pengertian keuangan negara menjadi lebih luas. Tetapi apabila keuangan negara tersebut ditinjau dari sudut pengurusan dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 1945 (sebelum amandemen ketiga UUD 1945), maka pengertian keuangan negara tersebut adalah dalam arti sempit yaitu hanya APBN saja. Sedangkan menurut M. Ichwan dalam W. Riawan Tjandra (2006), mengatakan bahwa keuangan negara adalah sebuah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang yang lazimnya satu tahun mendatang.

Pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UUKN dalam aliyah,s (2012) memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas dan dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang

bersangkutan. Tujuan diadakannya pemisahan secara tegas substansi keuangan negara dalam arti luas dengan substansi keuangan negara dalam arti sempit agar ada keseragaman pemahaman.

Pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum pada penjelasan umum UUKN Aliyah, S. (2012) adalah sebagai berikut :

- a. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
- b. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
- c. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban.
- d. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemikiran dan/atau

penguasaan obyek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada hakikatnya keuangan negara dalam arti sempit merupakan bagian keuangan negara dalam arti luas. Dalam hubungan dengan negara, keuangan negara dalam arti sempit merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran negara. Substansi keuangan negara dalam arti sempit berbeda dengan substansi keuangan negara dalam arti luas sehingga keduanya tidak boleh dipersamakan secara yuridis. Dengan demikian, substansi keuangan negara dalam arti sempit hanya tertuju pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk undang-undang.

2.1.2 Sistem Pengelolaan Keuangan

Adapun pengertian pengelolaan keuangan daerah yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut: Menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007) bahwa pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah: “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Kemudian menurut Muindro Renyowijoyo (2013) bahwa pengertian pengelolaan keuangan daerah merupakan: “Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Dan Menurut Baldrice Siregar (2015) bahwa pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah: “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

1. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Baldric Siregar (2015) keuangan daerah dikelola dengan azas tertentu. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisiensi, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berikut ini adalah uraian terhadap azas umum pengelolaan keuangan daerah tersebut:

- 1) Tertib Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Taat pada peraturan perundang-undangan keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- 3) Efektif Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- 4) Efisiensi Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

- 5) Ekonomis Pemerolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- 6) Transparan Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- 7) Bertanggungjawab Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 8) Keadilan Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- 9) Kepatuhan Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- 10) Manfaat Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rohcmansjah (2010), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah

meliputi:

1. Akuntabilitas
2. Kejujuran

3. Transparansi
4. Pengendalian
5. Value For Money

2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam sebuah organisasi.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan kepala satuan kerja dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan hanya sekadar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Penilaian atas kinerja keuangan pemerintah daerah diharapkan akan memberi manfaat untuk memonitor perkembangan keadaan keuangan yang ada di pemerintah daerah.

Keuangan daerah merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang aktivitas finansial pemerintah. Glen A. Welsch, et.al dalam Rahardjo (2011) menjelaskan bahwa keuangan publik merupakan suatu bentuk pernyataan dari sebuah rencana dan juga kebijaksanaan. Kebijaksanaan tersebut menyangkut manajemen yang digunakan dalam periode tertentu, yaitu petunjuk dalam periode tersebut. Sementara menurut Suparmoko dalam Supriati et al (2019) bahwa

keuangan publik merupakan suatu ilmu tentang pengaruh-pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara (publik) terhadap perekonomian, terutama pengaruh terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi pendapatan yang lebih merata, peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja. Dengan demikian, Otto Eckstein dalam Rahardjo (2011) menulis bahwa keuangan publik merupakan studi tentang dampak anggaran terhadap ekonomi, terutama pengaruhnya terhadap pencapaian objek ekonomi utama seperti pertumbuhan, stabilitas, keadilan dan efisiensi. Pada dasarnya, keuangan publik menjelaskan belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut kemudian membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Menurut Jumingan (2006), Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (*assets*), utang (*liabilities*), dan modal sendiri (*owners' equity*) dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, akhir triwulan, atau akhir tahun. Laporan posisi keuangan, atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban, adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada satu saat tertentu.

Pengelolaan keuangan daerah bertujuan agar pengelolaan keuangan rakyat oleh pemerintah dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggungjawabannya sehingga akan tercipta Perencanaan anggaran didalam pengelolaannya (Karsana dan Suaryana, 2017).

Implikasi keuangan publik terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju sebagai suatu lembaga pemerintahan akan senantiasa berupaya menjalankan pemerintahan dengan pengembangan teknik-teknik ekonomi demi mengoptimalkan pendapatan dan merealisasikan alokasi belanja secara cepat dan merata guna menjaga stabilitas ekonomi secara khusus dan menjamin ketersediaan pelayanan dasar terhadap masyarakat.

Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan pasal 2 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
- 3) Penerimaan daerah Pengeluaran daerah
- 4) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
- 5) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam penelitian Karsana dan Suaryana (2017), pertanggungjawaban pemerintah atas segala kegiatan yang dilakukan disajikan dalam Laporan Keuangan yang terdiri dari 7 jenis laporan yaitu

- 1) Laporan Realisasi Anggaran,
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
- 3) Neraca,
- 4) Laporan Operasional,
- 5) Laporan Arus Kas,
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2016:121) Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi tujuan yaitu :

- 1) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
- 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan
- 4) Memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Sino et al., (2013) menguraikan hasil analisis keuangan daerah digunakan sebagai tolak ukur dalam :

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otoda.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya

- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.

Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu Siswanto (2009) mengemukakan secara umum terdapat 5 indikator kinerja keuangan daerah yang efektif, yaitu:

- 1) Akurat (Accurate)
- 2) Tepat waktu (Timely)
- 3) Objektif dan Komprehensif (Objective and Comprehesible)
- 4) Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis (Focus on strategic control points)
- 5) Secara Ekonomi Realistik (Economically Realistic).

2.1.4 Implementasi Sistem Akutansi

Sistem Informasi adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa (McLeod, 2009:12). Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapat dari transaksi data untuk tujuan pelaporan internal kepada manajer untuk digunakan dalam pengendalian dan perencanaan sekarang dan operasi masa depan serta pelaporan eksternal kepada pemegang saham, pemerintah dan pihak-pihak luar lainnya (Yulianto et al., 2012).

Sistem Informasi Akuntansi merupakan teknik pengolahan data transaksi guna untuk menghasilkan informasi akuntansi dan keuangan perusahaan yang

bermanfaat bagi pengguna tingkat manajemen terutama pada bagian keuangan. Persediaan barang dagang merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan dagang dikarenakan perusahaan dagang aktivitas utamanya yaitu menjual barang kepada konsumen, untuk menjaga kestabilan proses penjualan barang maka setiap perusahaan harus mempunyai persediaan barang dagang yang siap untuk dijual kepada konsumen (Yulianto et al., 2012).

Untuk menyediakan informasi yang berkualitas bagi pengguna diperlukan sistem informasi manajemen yang sesuai dengan kebutuhan. Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sistem pengolahan data-data yang tersedia agar menjadi informasi yang berkualitas dengan menggunakan komputer maupun tanpa menggunakan komputer. Untuk memudahkan sistem melakukan fungsi-fungsi dalam menyajikan informasi maka sistem informasi manajemen dibagi menjadi divisi-divisi tersendiri, diantaranya adalah sistem informasi akuntansi, sistem informasi persediaan, sistem informasi personalia, dan masih banyak lagi divisi sistem informasi yang disesuaikan kebutuhan usaha (Muttaqin et al., 2014).

Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis (Rahmasari, 2019). Sistem informasi akuntansi penjualan adalah suatu sistem yang dirancang untuk memudahkan pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan penjualannya (Viola et al., 2017).

Sistem informasi akuntansi persediaan ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan sistem-sistem lainnya, di antaranya adalah sistem

pembelian, sistem retur pembelian, sistem penjualan, dan sistem retur penjualan(Mugiarti et al., 2017).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai: serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sedangkan Bastian (2007) memandang sistem akuntansi pemerintah daerah dari proses atau prosedur baik itu dengan menggunakan metode manual maupun secara terkomputerisasi. Prosedur yang dimaksud dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah.

1. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- 3) Neraca (N)
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7) Catatan Atas Laporan keuangan (caLK).

2. Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Matei, A. M., Karamoy, H., & Lambey, L.,2017) yaitu:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yaitu: penyajian jujur, dapat diverifikasi, netralitas.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat

dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam

bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

3. Indikator Implementasi Sistem Akuntansi

Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan diukur dengan 3 indikator (Permana, Irvan, 2011) yaitu:

- 1) Penerapan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas,
- 2) Penerapan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan,
- 3) serta penyajian secara wajar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Matei et al., (2017)	Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. <i>Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"</i> 8(1), 86–96.	Hasil penelitian ini menunjukkan fungsi Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud belum optimal, sehingga dibutuhkan strategi untuk mengatasi kendala-kendala

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yakni (1) penambahan tenaga pengawas; (2) meningkatkan kompetensi APIP; (3) meningkatkan alokasi anggaran pengawasan; (4) penambahan fasilitas pengawasan; (5) mengoptimalkan peran APIP sebagai konsultan dan katalis; (6) pemberian sanksi tegas bagi SKPD yang lalai atau kurang berkomitmen terhadap pelaksanaan pengawasan; dan (7) adanya komitmen bersama pemerintah daerah dalam bidang pengawasan
2	Andiani (2012)	Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah	Sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Selain itu, implementasi sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah
3	Setiawan & Putro (2013)	Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab LKPD Kabupaten Indragiri Hulu mendapatkan opini disclaimer karena adanya kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang belum sesuai dengan SAP, terbatasnya sumber daya manusia yang handal, tidak adanya inventarisasi aset serta hutang maupun piutang daerah dan lemahnya SPIP serta masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan

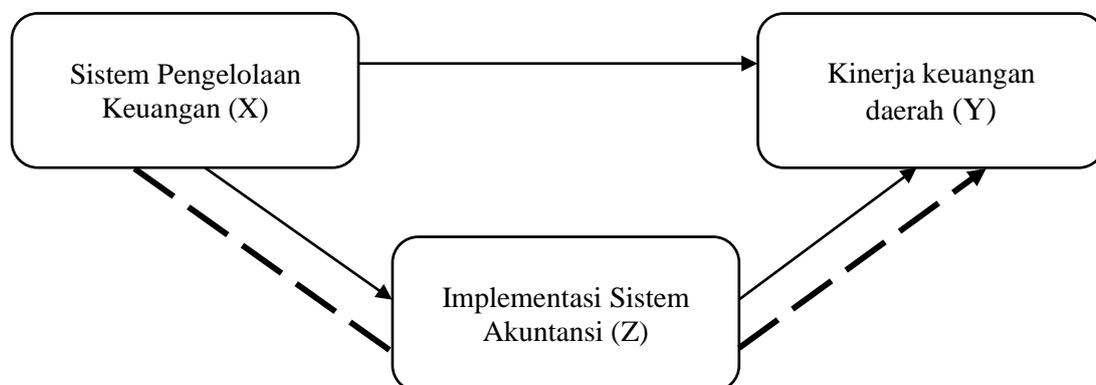
No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			perundang-undangan terkait
4	Annisa (2017)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan bidang pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik terhadap kinerja pemerintah daerah
5	Surjono & Firdaus (2017)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Terdapat pengaruh antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah
6	Bisma & Susanto (2010)	Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2207	Desentralisasi fiskal cukup mengingat ketergantungan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, efektifitas pengelolaan keuangan daerah sangat efektif namun pengelolaan APBD tidak efisien
7	Hidayat (2015)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja pemerintah daerah, (2) Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah
8	Lintong et al., (2017)	Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Kota	Implementasi Sistem Akuntansi berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Kotamobagu. Sistem Akuntansi di Pemerintahan Kota Kotamobagu sudah

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Kotamobagu. <i>Accountability</i>	menerapkan PP No. 71 tahun 2010 sehingga terjadi keefektifan pelaporan keuangan di daerah tersebut dan membuat kinerja dari pemerintah Kota Kotamobagu menjadi baik. Selain itu, Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Kotamobagu. Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Kotamobagu berorientasi pada kinerja yaitu sasaran strategis dan alokasi dana. Semua tahap mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban tercipta dengan baik sehingga kinerja yang diharapkan menjadi naik pula. Sedangkan, Pengawasan Internal tidak berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Kotamobagu. Pengawasan internal harus lebih memonitor semua program dan kegiatan operasional Pemerintah Kota Kotamobagu pada semua tingkatan. Pengawasan internal dituntut untuk lebih giat lagi melakukan koreksi atas penyimpangan dari kinerja yang diinginkan
9	Surjono dan Firdaus (2017)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan	Hasil penelitian menggambarkan bahwa koefisien korelasi adalah sebesar 0,738, yang berarti

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan	terdapat arah positif dan tingkat pengaruh yang kuat antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah
10	Defitri (2018)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin meningkat

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka kerangka pikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka dugaan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Diduga sistem pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap implementasi sistem akuntansi
- 2) Diduga sistem pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah
- 3) Diduga implementasi sistem akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah
- 4) Diduga sistem pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah jika dimediasi oleh implementasi sistem akuntansi